

MENOLONG PETANI DI PEDESAAN

oleh

Nurhadi

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah dunia yang selalu aktual, sebab di setiap negara sedang berkembang mempunyai masalah tersebut dan tidak dengan segera bisa terpecahkan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih 25,9 juta jiwa atau 13,67 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada akhir tahun 1993. Dari jumlah tersebut, 17,2 juta jiwa berada dipedesaan. Untuk membantu mereka dalam mengentaskan diri dari kemiskinan mutlak diperlukan pembangunan, dan salah satu diantaranya adalah pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian tersebut meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Pembangunan pertanian haruslah diarahkan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, dan sekaligus memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Artinya, jangan sampai hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh para pelepas uang dan tengkulak yang selalu menguasai tata niaga dan "perekonomian" di pedesaan.

Dalam menunjang pembangunan pertanian, pemerintah perlu melakukan campur tangan. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas umum (*social overhead capital*) yang dirasa berat kalau disediakan oleh para petani sendiri. Selain itu, perlu digalakkan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian agar produktivitas pertanian meningkat. Peran Keperasi Unit Desa (KUD) juga perlu diintensifkan dalam membina usaha pertanian supaya hasil pembangunan pertanian bisa betul-betul meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pendahuluan

Menurut Atmo Suwito dan Vidarta (Bernas Tanggal 13 Maret 1995 : 4), kemiskinan merupakan masalah dunia yang hingga kini tak kunjung dapat dipecahkan. Perkembangan dunia, baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun di berbagai bidang lainnya, tidak serta merta menjadi jawaban atas persoalan kemiskinan. Bahkan kini dihindangi semacam pesimisme yang mendalam, karena dalam banyak hal kemajuan ilmu pengetahuan hanya membawa pada peningkatan kualiti-

tas marginalisasi atas kaum rentan dan membantu laju akumulasi kapi bukan sebaliknya.

Begitu juga dengan perkembangan-perkembangan baru bidang tata negara dan perdagangan, kesemuanya hanya menjadi ja bagi percepatan proses akumulasi kapital. Pertemuan-pertemuan be antara negara-negara adidaya (G-7), sekali lagi hanya berkuat di sept pemecahan masalah pemekaran modal dan mempertahankan angka-an; produksi, bukan dalam rangka secara sungguh-sungguh memikiri bagaimana masalah kemiskinan dapat dipecahkan.

Kenaikan upah buruh sebagai misal, memang terjadi. Nan kenaikan tersebut sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa p; peningkatan taraf buruh, kalau secara faktual nilai tukar mereka tic berubah. Begitu juga dengan kenaikan harga gabah yang setiap tah meningkat, tetapi nilai tukar petani tidak kunjung meningkat.

Pembangunan yang kita lakukan cukup membuahkan hasil y; menggembirakan. Terbukti, jumlah penduduk yang berada di bav garis kemiskinan memang menurun dari tahun ke tahun. Data statis menunjukkan bahawa jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemis nan) menurun yaitu pada tahun 1990 sebesar 27,2 juta jiwa atau 15, persen menjadi 25,9 juta jiwa atau 13,67 persen dari seluruh penduc Indonesia pada tahun 1993. (Bernas, Tanggal 25 Maret 1994).

Mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan terseb 8,7 juta jiwa berdiam di perkotaan, sedangkan yang 17,2 juta jiwa ber am di pedesaan. Ini bisa terjadi sebab sekitar 80 persen penduduk In nesia tinggal di pedesaan.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bah hakekat pemba-ngunan nasional kita adalah pembangunan manu. Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhr (BP7 Pusat, 1994: 28). Pengertian pembangunan manusia dan masya kat yang utuh dan menyeluruh ini dijabarkan lebih lanjut dalam ti rumusan yaitu:

1. Ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan anta pembangunan lahiriah dan batiniah;
2. Pembangunan merata di seluruh tanah air;
3. Pembangunan untuk semua golongan, seluruh anggc masyarakat dan seluruh rakyat.

Memperhatikan komposisi jumlah penduduk di atas, kiranya tepat jika pemerintah selalu memperhatikan pembangunan pedesaan khususnya di bidang pertanian.

Kondisi pedesaan di Indonesia, diwarnai masih digunakan teknologi yang sangat sederhana (tradisional), sebagian besar produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan tingkat pendayagunaan faktor-faktor produksi rendah sehingga produktifitasnya rendah.

Apabila kita mengamati "potret desa miskin" secara seksama, maka kita akan mengetahui bahwa mereka berada serba dalam kekurangan. Meliputi kurang pangan, rendahnya pendidikan dus kebodohan, rendahnya kesehatan dan runyamnya lingkungan hidup. Mereka dalam keadaan yang serba sulit, kekurangan dan tidak bisa mengentaskan dirinya. Kita kemudian teringat tentang teori *kausasi sirkuler*-nya Gunar Myrdal yang menyatakan bahwa masyarakat miskin berada dalam lingkaran setan yang sulit untuk di cari mana ujung dan pangkalnya. Masyarakat miskin selalu kekurangan makan sehingga kondisi kesehatan jelek. Dengan kesehatan yang jelek maka produktivitas kerja rendah dan jumlah pendapatan akan menjadi rendah sehingga berakibat kurang makan. Karena kurang makan maka kesehatan jelek,.....dan seterusnya. Tanpa uluran dari pihak luar, terlebih lagi pemerintah, mereka sulit untuk mengembangkan dirinya. Terlepas dari benar tidaknya pendapat Myrdal tersebut dewasa ini, pemerintah memang seharusnya berpihak kepada simiskin dan lemah. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Oleh karena sebagian besar penghidupan mereka bergantung pada usaha pertanian, maka cara yang bisa ditempuh antara lain dengan peningkatan teknologi pertanian, memperbaiki struktur tata niaga produksi pertanian dan intensifikasi serta pemberian kemudahan dalam memberi modal dengan bunga murah. Untuk menunjang upaya ini, perhatian pemerintah terhadap masalah ini harus secara serius dan peran KUD perlu lebih lebih diintensifkan.

Pentingnya Pembangunan Pertanian

Pengertian pertanian di sini adalah pengertian secara luas, yaitu semua jenis kegiatan produksi yang mengandalkan "faktor produksi" utamanya berupa tanah. Dengan demikian, usaha pertanian bisa menca-

kup kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan; sebab semua kegiatan tersebut menggunakan tanah sebagai "faktor produksi" yang dominan.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa sektor pertanian perlu dibangun. Untuk kepentingan pembangunan nasional, pertanian merupakan posisi penting sebab:

1. Untuk pengembangan di sektor industri diperlukan dukungan daya beli masyarakat. Dan oleh karena sebagian besar masyarakat adalah masyarakat petani di pedesaan maka untuk meningkatkan pendapatan para petani diperlukan pembangunan pertanian.
2. Apabila harga bahan pangan murah maka biaya hidup masyarakat menjadi relatif murah. Dan jika upah minimum yang harus dikeluarkan di sektor industri menjadi lebih murah karena indeks harga kebutuhan pokok murah, maka pada gilirannya akan menekan biaya produksi di sektor industri. Ini sangat mendukung dalam rangka pengembangan ekspor non migas.
3. Banyak industri yang memerlukan bahan mentah yang merupakan produk dari sektor pertanian.

Dari sisi petani itu sendiri, sektor pertanian perlu dibangun sebab:

1. Ternyata sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja dan masih mempunyai potensi terpendam yang apabila bisa dieksploitasi secara ekonomis maka dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan "mengesankan"
2. Dengan peningkatan teknologi pertanian maka selain meningkatkan produktivitas pertanian juga akan memberikan peluang untuk menggeser sebagian pekerja di bidang pertanian beralih kerja ke sektor industri.

Arah Pembangunan Pertanian

Agar pembangunan di sektor pertanian tersebut dapat mencapai sasaran, maka haruslah diarahkan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, dan sekaligus memperluas lapangan

pekerjaan dan kesempatan berusaha. Kita tidak menghendaki bahwa hasil-hasil pembangunan justru hanya dinikmati oleh para pelepas uang dan para tengkulak yang merupakan "elite desa", dengan membiarkan kondisi petani dan nelayan tetap terlilit kemiskinan. Jika yang terjadi masih demikian, maka akan sia-sia upaya kita untuk mengentaskan penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tersebut.

Dalam pembangunan pertanian, upaya dalam diversifikasi, intensifikasi dan ditingkatkan secara terus menerus dengan perencanaan dan penyelenggaraan yang semakin terpadu dan disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Keadaan tanah, air, dan iklim, pola tata ruang, usaha pelestarian lingkungan hidup, pengembangan sektor lain, serta kehidupan dan kebutuhan masyarakat setempat selalu dijadikan titik sentral perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan pertanian. Selain itu, usaha tersebut haruslah dikembangkan dengan disertai "catatan" bahwa para petani harus terlibat secara aktif, agar hasil-hasil pembangunan tersebut juga dapat dinikmati oleh para petani. sejalan dengan itu, perlu ditingkatkan pula kemampuan dalam pengelolaan usaha pertanian terutama yang dikaitkan dengan usaha agro industri dan agribisnis untuk makin memperlancar keanekaragaman produksi serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam pemasaran komoditas pertanian.

Agar kesinambungan pembangunan pertanian terjamin maka diperlukan keterlibatan para ahli untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani. Selain itu, kemampuan para petani dalam penerapan dan penguasaan teknologi pertanian harus ditumbuhkan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Ini karena masih dijumpai adanya petani yang *bekerja* hanya secara tradisional, dan kadang-kadang kurang ekonomis. Mereka memang sudah bekerja keras, tetapi belum bekerja cerdas.

Dalam pembangunan pertanian segala potensi harus dikembangkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin, baik yang mengenai pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Sekalipun kebutuhan pangan kita sudah dapat dipenuhi dengan pembangunan pertanian tanaman pangan tetap perlu terus ditingkatkan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis bahan pangan. Upaya peningkatan produksi tanaman pangan tersebut bisa

dilaksanakan antara lain dengan peningkatan produktivitas usaha dan perluasan lahan pertanian serta peningkatan pemanfaatan, lahan kering (*tegalan*), pekarangan dan rawa dengan didukung oleh peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai, dan penanganan pasca panen yang lebih ekonomis kaitannya dengan peningkatan pendapatan.

Karena wilayah Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam hal kesuburan tanah, iklim yang cocok dan bervariasi, luasnya lahan dan banyaknya tenaga kerja yang tersedia, maka sangat dimungkinkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura seperti sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Kesemuanya tersebut bisa ditumbuhkembangkan menjadi agribisnis, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan jika dimungkinkan untuk pengembangan ekspor non migas.

Untuk mengembangkan potensi lahan kering banyak dijumpai kendala. Sebagai misal yang terjadi di Kabupaten Tuban Jawa Timur yang patut kita perhatikan dan setidaknya dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan untuk menganalisis yang serupa dipedesaan. Menurut Surodjo (1992:9) kendala tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan pengairan dan curah hujan, sehingga masa tanam menjadi pendek, dan tingkat penerapan teknologi budi daya menjadi terbatas.
2. Terbatasnya permodalan.
3. Kurang mantapnya kelompok tani dalam mendukung usaha-usaha perbaikan, karena bertani bukannya merupakan satu-satunya sumber pendapatan di lahan yang kering.
4. Terbatasnya tenaga kerja.
5. Kurang berminatnya petani melakukan perubahan pola usaha tani.
6. Belum mampunya kegiatan penyuluhan memberikan demonstrasi-demonstrasi yang diperlukan.

Di bidang perkebunan juga ada hal yang perlu dipecahkan yaitu mencari cara untuk selalu meningkatkan peran aktif petani sehingga pendapatan dan taraf hidup mereka naik.

Kita tidak menghendaki bahwa kiprah di bidang pembangunan di bidang perkebunan justru hanya menambah kekayaan para pemodal besar, dan bukannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pet-

ni. Oleh karena itu, para petani harus mampu menguasai jaringan dalam pengadaan bibit tanaman, pupuk dan obat-obatan, serta pemasaran hasil produksinya. Para petani (yang umumnya lemah) perlu dibina untuk lebih diintensifkan dalam menangani masalah ini.

Selain itu, perlu mencari upaya peningkatan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka peningkatan usaha sektor industri sehingga produk domestik bruto yang berasal dari sektor industri naik. Untuk itu, diperlukan peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganeekaragaman jenis dan pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering, dan rawa yang ditangani secara lebih intensif dan ekonomis dalam sistem agribisnis yang terpadu dengan agroindustri melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri. Usaha ini dapat dikembangkan misalnya dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR).

Untuk meningkatkan pendapatan petani, juga dapat ditempuh melalui pembangunan perikanan. Usaha perikanan di pedesaan harus diupayakan harus diupayakan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, dan kualitas kehidupan desa pantai dengan cara diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta juga dimungkinkan untuk meningkatkan nilai ekspor. Ini dapat dilakukan dengan pengembangan agribisnis perikanan melalui antara lain pola perikanan inti rakyat, mengintensifkan peranan Koperasi Unit Desa (KUD), meningkatkan teknologi yang dipergunakan dalam budidaya perikanan yang meliputi produksi dan kegiatan pasca panen, memberikan bantuan permodalan dengan tingkat bunga murah, dan memperkuat posisi petani dalam pemasaran.

Mengenai lahan untuk perikanan, masyarakat petani nelayan diberi penyuluhan mengenai pemanfaatan lahan perikanan secara optimal, baik lahan di daerah pantai, tambak maupun air tawar. Untuk masing-masing lokasi (lahan) tersebut, hendaknya dilakukan budidaya perikanan dengan jenis ikan yang sesuai dan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna.

Selain usaha-usaha tersebut di atas, untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani juga bisa dilakukan dengan pembangunan peternakan. Hal ini layak dilakukan sebab sebagian besar masyarakat di pedesaan sudah berkecimpung di bidang peternakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Pramono di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada tahun 1989 menunjukkan bahwa, dari 200 responden terdapat 101 responden yang memelihara ternak, dan pada wilayah *antara* dan pedesaan mengenai jenis hewan peliharaannya ternyata lebih banyak dibandingkan dengan di wilayah perkotaan (Heru Pramono: 1994:16). Gambaran tersebut merupakan sisi kecil dari "potret wilayah" yang menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah senang beternak. Kiranya potensi ini dapat terus dikembangkan untuk menambah penghasilan dan kesejahteraan petani.

Pengembangan usaha peternakan di pedesaan antara lain bisa ditempuh dengan peningkatan usaha diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi ternak melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sebagian besar mereka merupakan peternak "gurem", maka swasta harus ikut membantu bersama-sama dengan KUD setempat. Namun mesti yang harus diingat, jangan sampai para peternak pedesaan hanya menjadi "sapi perah" oleh swasta yang bermodal besar. Oleh karena itu, KUD perlu memberikan bantuan permodalan dan binaan usaha serta pemasaran hasil produksi peternakan agar hasil posisi peternak menjadi lebih baik.

Peran Pemerintah dan KUD dalam Menolong Petani

Berdasarkan uraian terdahulu, agar pembangunan pertanian dapat berhasil maka perlu diadakan kegiatan penunjang antaralain:

1. Pemerintah perlu menyediakan prasarana umum (*social overhead capital*). Oleh karena air merupakan kebutuhan utama dalam usaha pertanian, maka pemerintah perlu membangun jaringan irigasi yang lebih memadai dan lebih menyeimbangkan pemanfaatan air dan usaha konversi, melindungi areal produksi dan menghindarkan kerusakan akibat banjir dan kekeringan, serta mendukung pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian baru. Penyediaan prasarana umum tersebut akan sulit apabila hanya diserahkan kepada masyarakat petani yang *notabene* ekonominya lemah. Tentu saja, kebijakan pengairan tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan air bagi seluruh masyarakat (bukan hanya petani), sebab air juga dibutuhkan untuk pemukiman, industri,

pengembangan kelistrikan, dan pariwisata.

2. Pemerintah perlu menggalakkan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan lebih bagus lagi jika dilakukan pengembangan bioteknologi dan memasyarakatkannya secara intensif dengan koordinasi lintas sektoral yang mantap. Kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian (khususnya penelitian peternakan), pendidikan, segala bentuk pelatihan dan penyuluhan pertanian harus terus dikembangkan secara terarah sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat petani untuk mengelola dan mengembangkan usaha taninya. Dengan ditemukannya cara bertani yang lebih modern, penemuan obat-obatan hama tanaman, jenis-jenis pupuk yang efektif, dan varietas-varietas unggul sangat bermanfaat dalam menunjang usaha pembangunan pertanian. Mengenai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian, metodenya bisa berbagai macam (luwes) dan bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Organisasi-organisasi sosial seperti Kelompok tani, Kelompok Pendengar Pembaca dan Pemirsa (Kelompokcapir), dan Karang taruna bisa digunakan sebagaipenghantar *sosialisai* dari penerapan ilmu pengetahuan dan tekno-logi yang lebih ekonomis dan modern di bidang pertanian.
3. Perlunya pradata hukum untuk mengefektifkan pelaksanaan undang-undang tentang kelestarian hidup dan pemilikan lahan pertanian. Dalam pemanfaatan tanah, haruslah selalu dijaga kelestariaanya dan untuk lahan kritis perlu direhabilitasi agar kesuburannya pulih kembali. Selainitu, pemilikan, penguasaan dan penggunaan, serta pengalihan hak atas lahan harus dapat menjamin kelangsungan usaha pertanian. Artinya, kita tidak menghendaki adanya pemilikan lahan oleh seseorang secara berlebihan dan penguasaan lahan secara *absenti*, sedang dilain pihak ada petani yang pemilikan lahannya sangat kecil sehingga secara nasional produktivitas pertanian rendah.
4. Pemerintah dan KUD perlu segera menyediakan modal dengan bunga lunak serta persyaratan yang tidak begitu lunak. Dalam kenyataan desa-desa di Indonesia saat ini

kredit yang diperoleh petani antara lain bersumber dari (Thoby Mutis, tanpa tahun : 38):

- a. Bank pemerintah;
- b. Bank swasta (Bank komersial), badan pegadaian;
- c. Tukang riba, tukang ijon;
- d. Lembaga-lembaga desa (*community organization*) termasuk koperasi dan himpunan arisan
- e. Perorangan yang bertarif sosial antar kawan, kenalan akrab, dan tetangga

Jenis nomor c dan e, agaknya merupakan porsi yang terbesar dari jumlah kredit yang diperoleh petani di desa. Dan dari antaranya, kredit tukang riba masih amat berperan. Apabila pemerintah tidak segera memasyarakatkan *banking minded* maka masyarakat petani akan selalu "lari" ke tukang riba untuk mendapatkan modal usaha tani yang mendesak sekalipun bunganya sangat tinggi. Pada gilirannya upaya pembangunan pertanian yang dirintis tersebut bisa meningkatkan taraf hidup para petani. Padahal menurut Maman Suratman (1992:13), hakekat pembangunan pertanian adalah upaya meningkatkan teknologi dan pola berpikir serta bertindak masyarakat petani nelayan dari tradisional menjadi modern dan maju.

5. Pemerintah dan KUD harus berpihak kepada petani dalam jaringan pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi pertanian. Pada gilirannya, diharapkan usaha tersebut dapat meningkatkan produksi hasil pertanian dan pendapatan, yang sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat petani.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagian besar dari penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan. Dari 25,9 juta jiwa penduduk miskin, ternyata 17,2 juta jiwa berdiam di pedesaan. Untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, antara lain dapat di tempuh dengan pembangunan pertanian, yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Kendala yang biasa dihadapi dalam peningkatan pertanian, selain dari berasal dari keadaan faktor alam yang sering dijumpai adalah kurangnya air didaerah lajn kering. Sedangkan dari segi manusianya, kadang-kadang petani kurang berminat untuk melakukan perubahan pola tani yang sudah digeluti sejak lama secara turun temurun. Mereka banyak yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha taninya secara lebih modern.

Untuk menolong para petani perlu adanya perhatian dan uluran tangan dari pemerintah dan KUD. Pemerintah harus menunjang dalam penyediaan fasilitas umum (*social overhead capital*), menciptakan tatanan hukum yang bisa menjamin peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah maupun KUD perlu membantu dalam penyediaan permodalan yang dibutuhkan petani dengan tingkat bunga murah dan prasyartan yang tidak terlalu ketat, serta memperkuat posisi dalam jaringan pemasaran hasil produksi pertanian.

Daftar Kepustakaan

Atmo Suwito dan Vidarta, *LSM dan Kebangkitan Dunia Baru*, Berita Nasional, Edisi 13 Maret 1995.

Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (BP7) Pusat, (1994). *Bahan Penataran P4 Garis-Garis Besar Haluan Nagara*.

Berita Nasional, *Penduduk Miskin Turun dari 27,7 juta Jadi 25,9 juta Orang*. edisi 25 Maret !(((\$

Heru Pramono, (1994). *Pola Pemanfaatan Pekarangan dan Permasalahannya di Kecamatan Depok Sleman*, Informasi No.1 tahun XXI, Yayasan Penerbitan FPIPS IKIP YOgyakarta.

Maman Suratman. *Motivasi Pustakawan dalam Peningkatan Perannya untuk Pembangunan*, Bogor: Jurnal Perpustakaan Pertanian Volume 1 No.1 Maret 1992.

Mubyarto. *Pembangunan Manusia Indonesia*, Prisma No.1, Janu
1983.

Philip H Combs, Manzoor Ahmed, (1984). *Memerangi Kemiskinan
Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*, Jakarta : CV Re
wali.

Surodjo, *Pemanfaatan Lahan Kering Secara Optimal di Jawa Tim.*
Abstrak Hasil Penelitian Pertanian Indonesia, Volume
Nomor 2 tahun 1992.

Thoby Mutis, (tanpa tahun). *Kearah Selarasan Pembangunan Ekonor.*
Mekar Desa